

**UPAYA PENYELESAIAN MASALAH TUNGGAKAN PAJAK
DALAM RANGKA OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN DI BPPKAD KABUPATEN
MAGELANG**

TUGAS AKHIR

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Ahli Madya
Pada Program Studi Akuntansi Jenjang Diploma Tiga**



**Disusun Oleh:
Choirunisa Romadhoni
1910102049**

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERITAS TIDAR**

2022

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR

Nama Penyusun : Choirunisa Romadhoni
NPM : 1910102049
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi
Judul Tugas Akhir : **Upaya Penyelesaian Masalah Tunggakan Pajak dalam
Rangka Optimalisasi Penerimaan Pajak Bumi dan
Bangunan di BPPKAD Kabupaten Magelang**

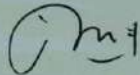
Dosen Pembimbing

1. Nuwun Priyono, S.E., M.Ak., Akt., CA.
2. Nibras Anny K., S.E, M.Sc., Ak.

Tugas Akhir disetujui pada tanggal: 28 Juni 2022

Magelang, 28 Juni 2022

Dosen Pembimbing I



Nuwun Priyono, S.E., M.Ak., Akt., CA.
NIP. 198010232015041001

Dosen Pembimbing II



Nibras Anny K., S.E., M.Sc., Ak.
NIP. 199202142019032023

Mengetahui,

Koordinator Program D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tidar



Octavia Lhaksmi Pramudyastuti, S.E., M.Acc., Ak.
NIP. 198810252019032017

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI

TUGAS AKHIR

Judul:

**Upaya Penyelesaian Masalah Tunggakan Pajak dalam Rangka Optimalisasi
Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di BPPKAD Kabupaten Magelang**

Oleh:

Nama : Choirunisa Romadhoni

NPM : 1910102049

Telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Penjaji

Pada tanggal: 05 Juli 2022

Nama Penguji

1. Nuwun Privono, S.E., M.Ak., Akt., CA.
Penguji I/Ketua
2. Nibras Anny K., S.E., M.Sc., Ak.
Penguji II/Sekretaris
3. Kartika Pradana Suryatimur, S.E., M.Acc.
Penguji III/ Anggota

Tanda Tangan

1. 
2. 
3. 



Prof. Dr. Hady Sasana, S.E., M.Si
NIP. 196901211997021001

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya menyatakan bahwa
Tugas Akhir dengan judul:

Upaya Penyelesaian Masalah Tunggakan Pajak dalam Rangka Optimalisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di BPPKAD Kabupaten Magelang

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tugas Akhir dengan judul diatas yang diajukan untuk diuji pada tanggal 05 Juli 2022, adalah hasil karya saya. Tugas Akhir ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin dan meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut di atas, baik dengan sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik Tugas Akhir yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan Universitas batal saya terima.



Magelang, 05 Juli 2022
ng memberi pernyataan

Choirunisa Romadhoni
Choirunisa Romadhoni

Saksi 1,
Sebagai Pembimbing I merangkap
Ketua Penguji

Nuwun Priyono
Nuwun Priyono, S.E., M.Ak., Akt., CA.

Saksi 2,
sebagai Pembimbing II merangkap
Sekretaris Penguji

Nibras Anny K.
Nibras Anny K., S.E., M.Sc., Ak.

Saksi 3, sebagai Anggota Penguji

Kartika Pradana Suryatimur
Kartika Pradana Suryatimur, S.E., M.Acc.

MOTTO PERSEMBAHAN

Motto:

“Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan”

(Q.S Al-Insyirah: 6)

”Sukses bukanlah akhir, kegagalan bukanlah fatal, yang terpenting adalah keberanian untuk melanjutkan”

(Winston S. Churchill)

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT, dengan segala kerendahan hati Tugas Akhir ini kupersembahkan untuk:

1. Orang tuaku tercinta yang telah memberikan dukungan moril maupun material serta do'a yang tiada henti untuk kesuksesan penulis.
2. Adik tercinta Ardi Bianto yang selalu memberi do'a dan semangat untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini.
3. Seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
4. Choirunisa Romadhoni, atas semangat untuk tetap bertahan dan berjuang dalam penyelesaian Tugas Akhir ini.
5. Pak Nuwun dan Ibu Nibras selaku pembimbing yang telah membimbing dalam pengerjaan Tugas Akhir ini.
6. Laela, Lena, Nisa, Alvian, Yogi, Andi, Arif, Hilmi dan Rusli yang selalu menemani, memotivasi, memberi masukan, serta menjadi tempat keluh kesah penulis selama kuliah hingga selesai pengerjaan Tugas Akhir ini.
7. Seluruh teman-teman K2 D3 Akuntansi yang telah memberikan kenangan selama perkuliahan ini.
8. Para pembaca terhormat yang membutuhkan Tugas Akhir ini sebagai bahan referensi.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan Tugas Akhir ini yang berjudul “Upaya Penyelesaian Masalah Tunggakan Pajak dalam Rangka Optimalisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di BPPKAD Kabupaten Magelang” dapat terselesaikan dengan baik. Penyusunan Tugas Akhir ini penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hadi Sasana, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Tidar yang telah memberikan ijin penelitian kepada penulis.
2. Dr. Utpala Rani, S.E., M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tidar yang telah memfasilitasi pelaksanaan penelitian kepada penulis.
3. Bapak Nuwun Priyono, S.E., M.Ak., Akt., CA. selaku dosen pembimbing I dan Ibu Nibras Anny K., S.E, M.Sc., Ak. selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan pengarahannya hingga tersusunnya tugas akhir ini.
4. Suci Nasehati Sunaningsih, M.Acc. selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan pengarahan yang tak terbatas waktu dari awal hingga akhir studi.
5. Para dosen Fakultas Ekonomi Universitas Tidar yang telah memberikan bekal ilmu dan pengetahuan sehingga dapat digunakan dalam penyusunan tugas akhir serta untuk bekal hidup di kehidupan mendatang.
6. Bapak, Ibu, Adik serta sahabat tercinta yang telah memberikan bantuan dan dukungannya baik moral maupun material.

7. Bapak Suprayitno, S.E. selaku Kepala Bidang Perencanaan, Pendataan, dan Penetapan Pendapatan (P4) yang telah memberikan izin dalam penyusunan tugas luaran.
8. Teman-teman D3 Akuntansi khususnya K2 yang telah memberikan motivasi dan semangat.
9. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian tugas akhir ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa hasil penyusunan Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kesediaan pembaca untuk memberikan kritik dan saran demi kesempurnaan Tugas Akhir ini.

Akhirnya penulis menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada pembaca seandainya terdapat kesalahan-kesalahan di dalam Tugas Akhir ini dan penulis berharap semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Magelang, 28 Juni 2022

Penulis

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab tunggakan, upaya untuk mengatasi tunggakan, realisasi penerimaan, kontribusi PBB terhadap PAD, dan upaya untuk mensosialisasikan wajib pajak pada BPPKAD Kabupaten Magelang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data diperoleh menggunakan metode wawancara, dokumentasi dan observasi. Teknik analisa data dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun 2017 dan 2018 belum mencapai target yang telah ditetapkan. Kemudian untuk kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan masih tergolong sangat kurang. Penyebab tunggakan PBB meliputi kesalahan data objek pajak, kurangnya sosialisasi pihak pemungut, kurang aktifnya aparat, masih rendahnya kesadaran wajib pajak, wajib pajak enggan memutakhirkan data, wajib pajak cenderung banyak alasan, keadaan ekonomi wajib pajak, wajib pajak tidak ditemukan. Upaya untuk mengatasi tunggakan PBB membuat tim penyelesaian piutang, pendekatan dengan wajib pajak, memberikan keringanan kepada wajib pajak, mengadakan sosialisasi kepada masyarakat, penertiban pemungut pajak, memberi insentif petugas pajak, penundaan jatuh tanggal tempo, dan pemutakhiran data. Sedangkan upaya untuk sosialisasi pembayaran PBB adalah penyuluhan melalui media cetak dan radio, penyuluhan melalui perantara remaja, penyuluhan dengan DAWIS, pemasangan spanduk, penyuluhan menggunakan mobil, dan penyuluhan menggunakan aplikasi *youtube*.

Kata Kunci: Penerimaan, Tunggakan, Pajak Bumi dan Bangunan

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the causes of arrears, efforts to overcome arrears, realization of revenue, PBB contribution to PAD, and efforts to socialize taxpayers at BPPKAD Magelang Regency. This study used descriptive qualitative method. Data collection techniques were obtained using interviews, documentation and observation. Data analysis techniques in this study are data reduction, data presentation and conclusion drawing. The results of this study indicate that the realization of Land and Building Tax receipts in 2017 and 2018 has not reached the set target. Then for the contribution of Land and Building Tax revenue is still very low. The causes of PBB arrears include errors in tax object data, lack of socialization of the collectors, less active officials, low awareness of taxpayers, taxpayers are reluctant to update data, taxpayers tend to have many reasons, economic conditions of taxpayers, taxpayers are not found . Efforts to overcome PBB arrears create a debt settlement team, approach taxpayers, provide relief to taxpayers, conduct socialization to the public, control tax collectors, provide tax officers incentives, delay due dates, and update data. While efforts to socialize PBB payments are counseling through print and radio media, counseling through youth intermediaries, counseling with DAWIS, installing banners, counseling using cars, and counseling using the YouTube application.

Keywords: Revenue, Arrears, Land and Building Tax

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI TUGAS AKHIR	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS.....	iv
MOTTO PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	8
1.3 Rumusan Masalah	9
1.4 Tujuan Penelitian.....	10
1.5 Manfaat Penelitian.....	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
2.1 Landasan Teori.....	12

2.1.2	Pajak Bumi dan Bangunan.....	14
2.1.2.1	Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan	15
2.1.2.2	Subjek Pajak Bumi dan Bangunan	16
2.1.2.3	Objek Pajak Bumi dan Bangunan	17
2.1.2.4	Tarif Pajak Bumi dan Bangunan.....	19
2.1.2.5	Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak dan PBB Terutang	21
2.1.2.6	Tahun Pajak, Saat, dan Tempat yang Menentukan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan	22
2.1.2.7	Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP), Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).....	23
2.1.2.8	Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan	25
2.2	Kerangka Teoritis	27
2.3	Kerangka Berpikir Penelitian	30
BAB III METODE PENELITIAN.....		32
3.1	Data dan Sumber Data	32
3.1.1	Jenis Data.....	32
3.1.2	Sumber Data	33
3.2	Teknik Pengumpulan Data.....	34
3.2.1	Observasi.....	35
3.2.2	Wawancara	35
3.2.3	Dokumentasi	36
3.2.4	Studi pustaka	36

3.3	Teknik Analisa Data	36
3.3.1	Reduksi Data.....	37
3.3.2	Penyajian Data.....	38
3.3.3	Penarikan Data Kesimpulan	40
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	41
4.1	Gambaran Umum Perusahaan.....	41
4.1.1	Sejarah BPPKAD Kabupaten Magelang.....	41
4.1.2	Profil dan Visi Misi BPPKAD Kabupaten Magelang.....	42
4.1.3	Struktur Organisasi BPPKAD Kabupaten Magelang.....	45
4.2	Hasil dan Pembahasan.....	47
4.2.1	Hasil Penelitian	47
4.2.2	Pembahasan	52
BAB V	PENUTUP	73
5.1	Kesimpulan	73
5.2	Keterbatasan Penelitian.....	75
5.3	Saran	75
DAFTAR PUSTAKA.....		77
LAMPIRAN		80

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Hasil Penelitian Terdahulu.....	27
Tabel 2. 2 Kerangka Berfikir Penulis	31



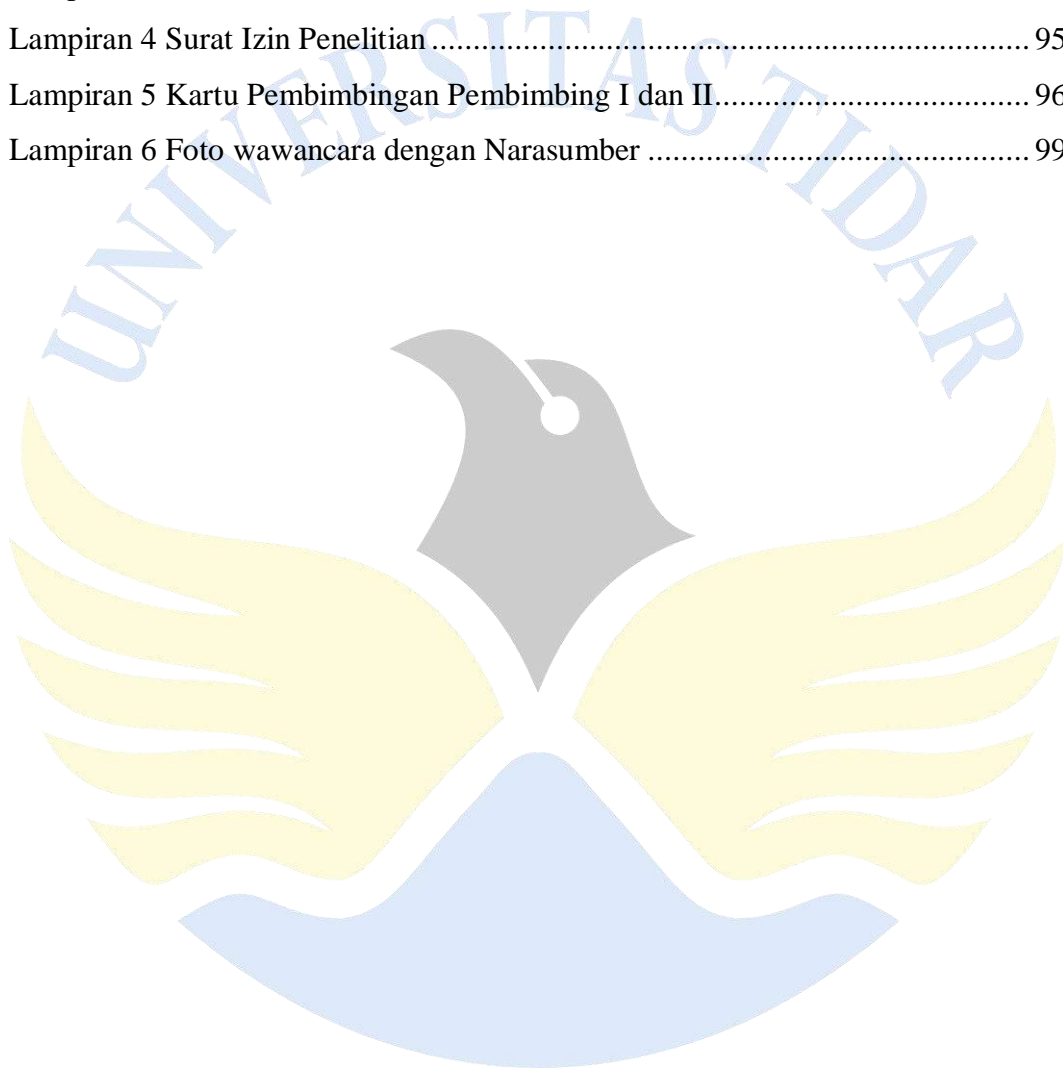
DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi BPPKAD Kabupaten Magelang	45
Gambar 4. 2 Perkembangan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di BPPKAD Kabupaten Magelang Tahun 2017-2021	50
Gambar 4. 3 Kontribusi PAD terhadap PBB Tahun 2017-2020	52
Gambar 4. 4 Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan di BPPKAD Kabupaten Magelang Tahun 2017-2021	54



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Pendukung	81
Lampiran 2 Transkrip Wawancara.....	87
Lampiran 3 Bukti Submit Jurnal	94
Lampiran 4 Surat Izin Penelitian	95
Lampiran 5 Kartu Pembimbingan Pembimbing I dan II.....	96
Lampiran 6 Foto wawancara dengan Narasumber	99



DAFTAR PUSTAKA

- Afifuddin & Beni Ahmad Saebani. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Anisa Nur, Elva Nuraina & Liana Vivin Wihartanti. 2019. *Analisis Efektivitas dan Kontribusi PBB-P2 Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah*. 7(2). 45-58.
- Chandra, Cherry Agustine, Harijanto Sabijono & Treesje Runtu. 2020. *Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Gorontalo Tahun 2016-2018*. *Jurnal Riset Akuntansi*. Vol. 15 (3) hal. 290-298.
- Firdausy, Carunia Mulya. 2017. *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Hendri, Jon & Lena Farida. 2013. *Optimalisasi Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan*. *Jurnal Administrasi Pembangunan*. Vol. 1 (2). Hal. 101-218.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2020. *Wujudkan Indonesia Adil dan Sejahtera, Menkeu: Pajak Memiliki Prinsip Gotong Royong*. Diakses dari : <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/wujudkan-indonesia-adil-sejahtera-menkeu-pajak-memiliki-prinsip-gotong-royong/>
- Kementerian Keuangan. *Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000*. Jakarta
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Edisi Kedua. Yogyakarta: CV ANDI OFFSET.
- Misbahudin & Iqbal Hasan. 2014. *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara.

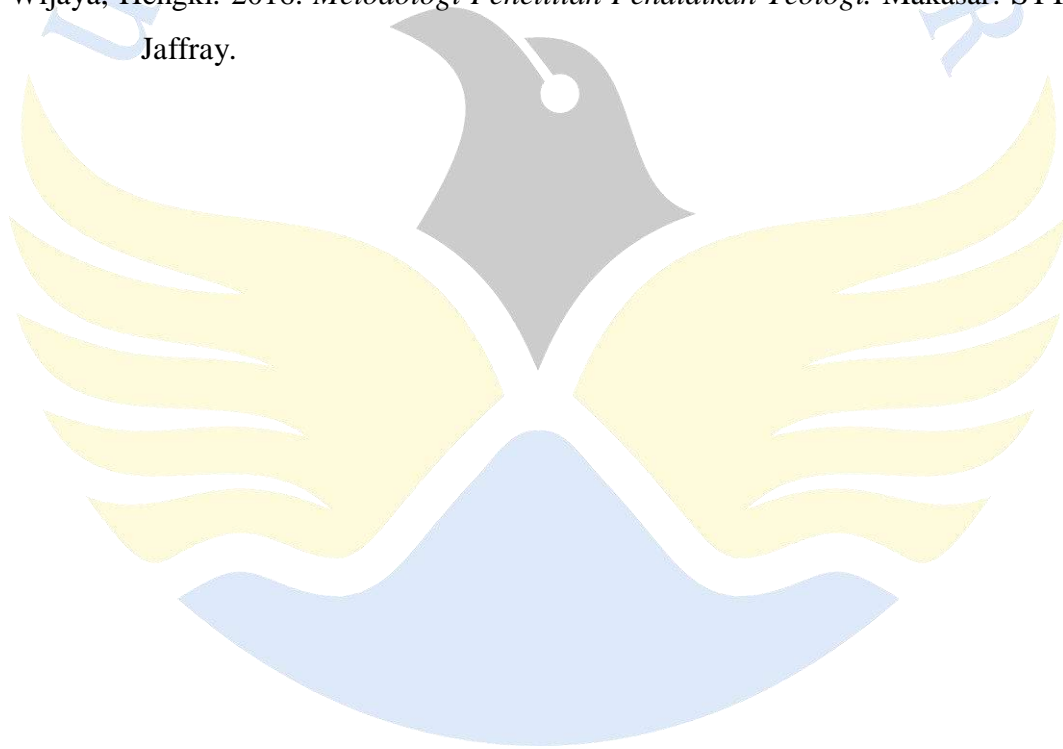
- Nugrahani, Farida. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Solo: Cakra Books.
- Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004*. Jakarta.
- Prastiwi, Dewi & Made Dudy Satyawan. 2014. *Identifikasi Permasalahan Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Wilayah Kabupaten Madiun*. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis. Vol 9 (2).
- Rahmawan, Eddy. 2012. *Optimalisasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Dalam Peningkatan Pendapatan Daerah (Studi Pemungutan PBB di Kecamatan Limpau Kabupaten Hulu Sungai Tengah)*. Vol 1(2).
- Rijali, Ahmad. 2018. *Analisis Data Kualitatif*. Banjarmasin: UIN Antasari Banjarmasin.
- Shuha, Khalida. 2018. Analisis Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Desa-Desa Selingkungan Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman). *Jurnal Akuntansi*. Vol. 6 No. 2 hal 1-19.
- Siregar, Baldric. 2017. *Akuntansi Sektor Publik. Edisi 2*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Siregar, Syofian. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana.
- Suandy, Erly. 2015. *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V.Wiratna. 2018. *Metodologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi Pendekatan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Baru Pres.
- Tersina, Andra. 2018. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Thahjono, Achmad & Muhammad Fakhri Husein. 2012. *Perpajakan*. Yogyakarta: STIM YKPN.

Tri Irianti, Ervita & Fitrotun Niswah. (2021). *Optimalisasi Penmungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Gresik*. 9(4). 501-514.

Wardani, Raudhatun & Wida Fadhlia. 2017. *Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Aceh Besar*. Vol 2(3) hal. 10-17.

Wijaya, Hengki. 2016. *Metodologi Penelitian Pendidikan Teologi*. Makasar: STT Jaffray.



LAMPIRAN



Lampiran 1 Data Pendukung

Lampiran 1. 1 Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

REALISASI PENERIMAAN PBB TAHUN 2017 SE KABUPATEN MAGELANG S/D MINGGU IV TANGGAL 31 DESEMBER 2017 (Berdasarkan Laporan Bank Jateng)						
RANGKING	KECAMATAN	REALISASI PBB (NOMINAL DAN %)				JUMLAH DESA LUNAS
		POKOK PBB	REALISASI	KEKURANGAN	%	
a	b	c	d	e	f	g
1	PAKIS	1.040.056.496	1.040.056.496	-	100,00%	20 / 20
2	NGABLAH	780.930.528	780.930.528	-	100,00%	16 / 16
3	CANDIMULYO	1.110.710.959	1.110.710.959	-	100,00%	19 / 19
4	SRUMBUNG	1.013.428.880	1.013.428.880	-	100,00%	17 / 17
5	KALIANGKRIK	870.746.469	870.746.469	-	100,00%	20 / 20
6	NGLUWAR	736.758.897	736.758.897	-	100,00%	8 / 8
7	DUKUN	1.074.057.331	1.074.057.331	-	100,00%	15 / 15
8	WINDUSARI	863.110.730	861.019.221	2.091.509	99,76%	20 / 20
9	KAJORAN	1.237.826.165	1.223.646.998	14.179.167	98,85%	26 / 29
10	SAWANGAN	1.178.586.810	1.156.649.518	21.937.292	98,14%	14 / 15
11	SALAMAN	1.316.506.094	1.202.845.510	113.660.584	91,37%	15 / 20
12	MUNTILAN	1.868.524.377	1.677.292.765	191.231.612	89,77%	7 / 14
13	BANDONGAN	1.212.486.548	1.061.332.308	151.154.240	87,53%	3 / 14
14	TEGALREJO	1.022.629.219	890.453.762	132.175.457	87,07%	13 / 21
15	SALAM	1.373.918.941	1.196.024.043	177.894.898	87,05%	2 / 12
16	BOROBUDUR	1.553.620.694	1.346.161.445	207.459.249	86,65%	11 / 20
17	MUNGKID	1.633.689.122	1.406.649.179	227.039.943	86,10%	6 / 16
18	GRABAG	1.702.441.802	1.413.566.961	288.874.841	83,03%	15 / 28
19	SECANG	1.823.029.957	1.480.316.268	342.713.689	81,20%	6 / 20
20	TEMPURAN	1.530.458.719	1.213.912.394	316.546.325	79,32%	6 / 15
21	MERTOYUDAN	2.562.407.480	2.031.102.162	531.305.318	79,27%	1 / 13
	Jumlah	27.505.926.218	24.787.662.094	2.718.264.124	90,12%	260 / 372

Target Penerimaan : 25.647.492.000

**REALISASI PENERIMAAN PBB TAHUN 2018
SE KABUPATEN MAGELANG
S/D MINGGU IV TANGGAL 31 DESEMBER 2018
(Berdasarkan Laporan Bank Jateng)**

RANKING	KECAMATAN	REALISASI PBB (NOMINAL DAN %)				JUMLAH DESA LUNAS
		POKOK PBB	REALISASI	KEKURANGAN	%	
a	b	c	d	e	f	g
1	PAKIS	1.040.384.711	1.040.384.711	-	100,00%	20 / 20
2	NGABLAK	781.231.490	781.231.490	-	100,00%	16 / 16
3	CANDIMULYO	1.113.006.369	1.113.006.369	-	100,00%	19 / 19
4	SRUMBUNG	1.014.779.555	1.014.779.555	-	100,00%	17 / 17
5	NGLUWAR	738.039.671	738.039.671	-	100,00%	8 / 8
6	KALIANGKRIK	868.740.495	868.740.495	-	100,00%	20 / 20
7	DUKUN	1.072.813.476	1.072.813.476	-	100,00%	15 / 15
8	WINDUSARI	868.395.199	868.395.199	-	100,00%	20 / 20
9	KAJORAN	1.241.198.477	1.241.198.477	-	100,00%	28 / 29
10	SAWANGAN	1.179.084.567	1.144.400.575	34.683.992	97,06%	13 / 15
11	TEGALREJO	1.023.123.927	975.965.007	47.158.920	95,39%	16 / 21
12	SALAMAN	1.322.668.290	1.234.092.322	88.575.968	93,30%	17 / 20
13	BOROBUDUR	1.558.210.486	1.410.463.963	147.746.523	90,52%	14 / 20
14	MUNTILAN	1.877.757.520	1.698.186.847	179.568.673	90,44%	9 / 14
15	BANDONGAN	1.213.189.226	1.096.439.065	116.750.161	90,38%	7 / 14
16	SALAM	1.370.391.423	1.200.280.505	170.110.918	87,59%	7 / 12
17	GRABAG	1.703.188.527	1.436.112.523	267.076.004	84,32%	13 / 28
18	MUNGKID	1.637.327.901	1.363.401.996	273.925.905	83,27%	6 / 16
19	MERTOYUDAN	2.583.202.167	2.089.788.049	493.414.118	80,90%	- / 13
20	TEMPURAN	1.533.384.046	1.229.301.963	304.082.083	80,17%	7 / 15
21	SECANG	1.870.509.185	1.421.327.345	449.181.840	75,99%	5 / 20
	Jumlah	27.610.626.708	25.038.351.603	2.572.275.105	90,68%	277 / 372

25.647.492.000

**REALISASI PENERIMAAN PBB TAHUN 2019
SE KABUPATEN MAGELANG
S/D MINGGU IV TANGGAL 31 DESEMBER 2019
(Berdasarkan Laporan Bank Jateng)**

RANGKING	KECAMATAN	REALISASI PBB (NOMINAL DAN %)				JUMLAH DESA LUNAS	
		POKOK PBB	REALISASI	KEKURANGAN	%		
a	b	c	d	e	f	g	
1	PAKIS	1.382.113.927	1.382.113.927	-	100,00%	20	/ 20
2	CANDIMULYO	1.472.413.271	1.472.413.271	-	100,00%	19	/ 19
3	NGABLAK	1.025.784.444	1.025.784.444	-	100,00%	16	/ 16
4	KALANGKRIK	1.103.276.993	1.103.276.993	-	100,00%	20	/ 20
5	SRUMBUNG	1.345.866.859	1.345.866.859	-	100,00%	17	/ 17
6	NGLUWAR	966.537.432	966.537.432	-	100,00%	8	/ 8
7	WINDUSARI	1.127.688.838	1.127.688.838	-	100,00%	20	/ 20
8	DUKUN	1.403.449.719	1.403.449.719	-	100,00%	15	/ 15
9	SALAMAN	1.740.962.861	1.657.702.574	83.260.287	95,22%	18	/ 20
10	KAJORAN	1.634.125.804	1.540.530.955	93.594.849	94,27%	21	/ 29
11	MUNTILAN	2.352.462.857	2.212.216.111	140.246.746	94,04%	9	/ 14
12	SAWANGAN	1.492.961.974	1.395.893.490	97.068.484	93,50%	10	/ 15
13	BOROBUDUR	1.994.965.834	1.852.537.285	142.428.549	92,86%	12	/ 20
14	BANDONGAN	1.584.557.665	1.463.033.765	121.523.900	92,33%	5	/ 14
15	SALAM	1.787.514.039	1.576.996.243	210.517.796	88,22%	5	/ 12
16	MUNGKID	2.113.342.577	1.853.772.735	259.569.842	87,72%	3	/ 16
17	TEGALREJO	1.342.695.248	1.143.952.545	198.742.703	85,20%	11	/ 21
18	TEMPURAN	2.024.400.178	1.653.278.338	371.121.840	81,67%	6	/ 15
19	MERTOYUDAN	3.151.771.748	2.515.890.229	635.881.519	79,82%	-	/ 13
20	GRABAG	2.244.272.957	1.788.698.935	455.574.022	79,70%	10	/ 28
21	SECANG	2.410.057.483	1.817.653.986	592.403.497	75,42%	4	/ 20
Jumlah		35.701.222.708	32.299.288.674	3.401.934.034	90,47%	249	/ 372

30.611.719.000

**REALISASI PENERIMAAN PBB TAHUN 2020
SE KABUPATEN MAGELANG
S/D MINGGU V TANGGAL 31 DESEMBER 2020
(Berdasarkan Laporan Bank Jateng)**

RANGKING	KECAMATAN	REALISASI PBB (NOMINAL DAN %)				JUMLAH DESA LUNAS
		POKOK PBB	REALISASI	KEKURANGAN	%	
a	b	c	d	e	f	g
1	NGABLAK	1.024.149.642	1.024.149.642	-	100,00%	16 / 16
2	CANDIMULYO	1.471.644.451	1.471.644.451	-	100,00%	19 / 19
3	SRUMBUNG	1.344.588.680	1.344.588.680	-	100,00%	17 / 17
4	KALANGKRIK	1.104.260.338	1.104.260.338	-	100,00%	20 / 20
5	DUKUN	1.401.227.299	1.389.224.402	12.002.897	99,14%	14 / 15
6	SAWANGAN	1.496.180.465	1.479.386.925	16.793.540	98,88%	14 / 15
7	WINDUSARI	1.120.359.923	1.095.723.566	24.636.357	97,80%	16 / 20
8	NGLUWAR	965.884.718	895.165.394	70.719.324	92,68%	5 / 8
9	MUNTILAN	2.352.027.431	2.123.932.156	228.095.275	90,30%	6 / 14
10	PAKIS	1.383.221.875	1.247.115.700	136.106.175	90,16%	13 / 20
11	SALAMAN	1.748.471.191	1.532.585.795	215.885.396	87,65%	12 / 20
12	KAJORAN	1.631.857.683	1.414.259.545	217.598.138	86,67%	18 / 29
13	SALAM	1.787.960.314	1.542.714.314	245.246.000	86,28%	2 / 12
14	GRABAG	2.243.871.364	1.913.246.785	330.624.579	85,27%	9 / 28
15	TEMPURAN	2.142.442.822	1.764.720.046	377.722.776	82,37%	6 / 15
16	BANDONGAN	1.581.648.550	1.289.370.615	292.277.935	81,52%	1 / 14
17	MUNGKID	2.121.712.955	1.651.976.300	469.736.655	77,86%	3 / 16
18	BOROBUDUR	1.976.850.178	1.502.315.699	474.534.479	76,00%	6 / 20
19	MERTOYUDAN	3.220.583.423	2.335.067.717	885.515.706	72,50%	- / 13
20	TEGALREJO	1.342.292.070	877.372.360	464.919.710	65,36%	3 / 21
21	SECANG	2.447.835.201	1.591.543.614	856.291.587	65,02%	3 / 20
Jumlah		35.909.070.573	30.590.364.044	5.318.706.529	85,19%	203 / 372

Target : 21.210.710.928

**REALISASI PENERIMAAN PBB TAHUN 2021
SE KABUPATEN MAGELANG
S/D MINGGU IV TANGGAL 31 DESEMBER 2021
(Berdasarkan Laporan Bank Jateng)**

RANGKING	KECAMATAN	REALISASI PBB (NOMINAL DAN %)				JUMLAH DESA LUNAS
		POKOK PBB	REALISASI	KEKURANGAN	%	
a	b	c	d	e	f	g
1	NGABLAK	1.019.046.783	1.019.046.783	-	100,00%	16 / 16
2	CANDIMULYO	1.470.201.794	1.470.201.794	-	100,00%	19 / 19
3	SRUMBUNG	1.344.193.152	1.344.193.152	-	100,00%	17 / 17
4	DUKUN	1.398.496.932	1.398.496.932	-	100,00%	15 / 15
5	NGLUWAR	964.404.556	964.404.556	-	100,00%	8 / 8
6	WINDUSARI	1.116.939.237	1.116.939.237	-	100,00%	20 / 20
7	SAWANGAN	1.495.469.034	1.438.496.157	56.972.877	96,19%	12 / 15
8	KALIANKRIK	1.104.073.483	1.052.425.369	51.648.114	95,32%	16 / 20
9	PAKIS	1.383.252.500	1.310.401.637	72.850.863	94,73%	17 / 20
10	SALAMAN	1.748.949.548	1.646.047.560	102.901.988	94,12%	16 / 20
11	BANDONGAN	1.578.596.722	1.479.839.881	98.756.841	93,74%	3 / 14
12	SALAM	1.786.924.076	1.636.929.031	149.995.045	91,61%	5 / 12
13	MUNTILAN	2.350.148.646	2.133.591.357	216.557.289	90,79%	8 / 14
14	TEMPURAN	2.140.032.512	1.942.060.439	197.972.073	90,75%	10 / 15
15	KAJORAN	1.632.156.595	1.462.556.794	169.599.801	89,61%	21 / 29
16	GRABAG	2.241.678.499	1.959.290.134	282.388.365	87,40%	11 / 28
17	BOROBUDUR	1.983.418.237	1.681.935.634	301.482.603	84,80%	9 / 20
18	MUNGKID	2.124.828.755	1.756.583.935	368.244.820	82,67%	3 / 16
19	SECANG	2.449.670.822	1.953.507.805	496.163.017	79,75%	3 / 20
20	MERTOYUDAN	3.225.104.543	2.489.440.110	735.664.433	77,19%	- / 13
21	TEGALREJO	1.342.611.658	945.997.148	396.614.510	70,46%	6 / 21
Jumlah		35.900.198.084	32.202.385.445	3.697.812.639	89,70%	235 / 372

target Penerimaan : 32.000.000.000

Lampiran 1. 2 Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Pajak Bumi dan Bangunan

**LAPORAN REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH & PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
BPPKAD KABUPATEN MAGELANG**

URAIAN	REALISASI 2017	REALISASI 2018	REALISASI 2019	REALISASI 2020
Pendapatan Asli Daerah	309.181.973.960	324.499.694.330	416.360.835.086	329.883.771.474
Pajak Bumi dan Bangunan	24.787.662.094	25.038.351.603	32.299.288.674	30.590.364.044

Lampiran 2 Transkrip Wawancara

TRANSKIP WAWANCARA**A. Narasumber 1**

Nama : Suprayitno, S.E.

Jabatan : Kepala Bidang P4

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa saja faktor penyebab tunggakan PBB di BPPKAD	<p>Faktor dibagi menjadi dua yaitu eksternal dan internal. Faktor eksternal berhubungan dengan wajib pajak. Faktor internal berhubungan dengan petugas pajak atau dokumen.</p> <p>Faktor eksternal yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wajib pajak tidak ditemukan, jadi wajib pajak membeli sebuah tanah tetapi pergi, wajib pajak membawa sertifikatnya tetapi tidak tahu kemana, maksudnya hanya berinvestasi tanah dan wajib pajak merasa yang penting dia mempunyai dokumen tanahnya. 2. Wajib pajak ada yang tidak mau bayar, dia merasa tanahnya tidak produktif, dia memiliki kurang kemampuan bayar, dia tidak mau tau dengan berbagai alasan <p>Faktor internal yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Obyeknya ada tetapi ketetapannya ada, sebabnya PBB itu berasal dari peralihan hak. Bisa jadi saat ada perubahan hak mutasi baik itu waris atau jual beli induknya tidak berubah. 2. Atau sebaliknya obyeknya ada tetapi ketetapan tidak ditemukan. Sebabnya seharusnya saat mutasi induknya harus dipecah tetapi dalam hal ini dikarenakan saat pengajuan dokumennya tidak lengkap.
2.	Upaya yang dilakukan BPPKAD untuk mengatasi tunggakan PBB?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tetap dilakukan penagihan, untuk tidak memberatkan masyarakat yaitu penghapusan denda administrasi sebesar 2%. Jadi masyarakat hanya membayar pokoknya saja 2. Dilakukan pemutakhiran data di Desa secara masal <p>Karena proses peralihan hak masyarakat</p>

		banyak yang belum mengetahui, peralihan hak dilakukan oleh notaris bukan Desa 3. Melakukan pendekatan ke wajib pajak jika ada
3.	Kendala yang dihadapi oleh pihak BPPKAD dalam mengatasi tunggakan PBB?	Jika wajib pajak tidak di ditemukan, terdapat perusahaan yang tidak operasional jadi wajib pajak cenderung sulit untuk ditagih
4.	Bagaimana respon wajib pajak saat dilakukan penagihan?	Respon wajib pajak bermacam-macam ada yang langsung bayar, dan ada yang sulit jika dilakukan penagihan dengan berbagai alasan
5.	Apakah yang menyebabkan kesadaran masyarakat rendah dalam membayar pajak	Wajib pajak egois, walaupun pihak BPPKAD sudah melakukan sosialisasi masyarakat mengeluh untuk apa sosialisasi itu bagi saya
6.	Apakah terdapat sanksi untuk wajib pajak yang menunggak?	Ada yaitu sanksi berupa administrasi denda 2%
7.	Bagaimana upaya untuk merealisasikan penerimaan PBB di BPPKAD Kabupaten Magelang?	Memberikan <i>reward</i> kepada petugas pajak kepada pihak Kecamatan/ Desa

B. Narasumber 2

Nama : Triyogo Siswo Rini, S.E. MM.

Jabatan : Kabid P3SP

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa saja faktor penyebab tunggakan PBB di BPPKAD?	Tidak ditemukannya subyek dan obyek pajak, Kesalahan pihak petugas pajak misalnya data tidak segera dimutakhirkan, tidak ditagihkan Maksudnya tidak ditagihkan, pihak BPPKAD Kabupaten Magelang saat dilakukan penagihan berkerja sama dengan Kecamatan dan Desa/Kelurahan, kadang tim yang terakhir belum tersentuh wajib pajak
2.	Upaya yang dilakukan BPPKAD untuk mengatasi tunggakan PBB?	1. Melakukan pendekatan, membuat surat penagihan pajak untuk yang jatuh tempo, kalau yang belum membuat surat pemberitahuan. 2. Membuat stiker untuk wajib pajak yang belum membayar tetapi kami belum pasang karena beberapa kendala , tetapi wajib pajak mengeluh

		<p>saat dilakukan pemasangan stiker takutnya akan bermasalah dengan SATPOL.</p> <p>3. Kabupaten Magelang membuat kebijakan penghapusan administrasi denda sebesar 2% pada tahun 2022. Denda 2 % bermula tahun 2019 dan 2020. Sebelum tahun 2019 penghapusan denda karena banyak yang mengajukan penghapusan denda. Pada tahun 2019 sampai 2021 denda diberlakukan kembali karena banyak yang menunggak. Jadi untuk tahun 2022 wajib pajak yang menunggak pajaknya tahun-tahun sebelumnya akan dibebaskan dendanya sampai Desember 2022. Penghapusan cukup efektif untuk mencapai target penerimaan karena wajib pajak akan merasa tertarik melunasi piutangnya PBB tahun sebelum-sebelumnya daripada saat dikenakan denda administrasi sehingga wajib pajak berlomba-lomba melunasi pajak sebelum denda administrasi diberlakukan kembali. Penghapusan denda dapat ditargetkan kurangi 40 persen tunggakan.</p> <p>4. Membuat tim penagihan piutang, jadi tim tersebut memantau piutang. Jadi untuk setiap target penerimaan atau target piutang yang mengatasi tim tersebut. Selanjutnya aplikasi E-PBB sudah terkoneksi antara DPMPTSP, SATPOL, DPM salah satu bentuk kemudahannya saat melakukan penagihan melalui aplikasi, karena SDM semakin sedikit maka memaksimalkan teknologi yang ada.</p> <p>5. Pengurangan piutang tahun berjalan, wajib pajak belum membayar jadi mereka bisa mengajukan permohonan keringanan sebelum jatuh tempo.</p>
3.	Kendala yang dihadapi oleh pihak BPPKAD dalam mengatasi tunggakan PBB?	SDMnya semakin sedikit, karena wajib pajak yang banyak melakukan peralihan hak dan notaris tidak melibatkan desa jadi saat peralihan hak, desa tidak mengetahui. Karena dulu data hanya diakses dari atas ke bawah sekarang data bisa diakses dari bawah ke atas.
4.	Bagaimana respon wajib pajak saat dilakukan	BPPKAD melibatkan dari Desa, jadi dari Desa memberikan informasi mengenai wajib pajak.

	penagihan?	<p>Setelah ada kendala BPPKAD melakukan pendekatan. Saat pembayaran wajib pajak bisa langsung ke Bank tetapi masih banyak wajib pajak yang menitipkan pembayaran ke Desa. Kalau kepercayaan wajib pajak yang tidak bagus dia tidak percaya. Maka untuk kepala kadus dari kami untuk menjaga integritas, karena kalau tidak ada integritas jadi permasalahan dengan wajib pajak.</p> <p>Kemudian terdapat wajib pajak yang langsung membayar, ada yang marah saat dilakukan pembayaran, ada yang banyak alasan tidak mau membayar, terkadang ada informasi Desa yang tidak disampaikan ke wajib pajak, wajib pajak banyak yang tidak tahu mengenai pembayaran di Bank.</p>
5.	Apakah yang menyebabkan kesadaran masyarakat rendah dalam membayar pajak	Kondisi perekonomian wajib pajak yang kurang, ada wajib pajak yang memang sibuk, jadi didatengi beberapa kali mereka tidak ada
6.	Apakah terdapat sanksi untuk wajib pajak yang menunggak?	<p>Sanksi sebesar 2% per bulan setelah jatuh tempo. Jadi jatuh tempo 30 September kemudian bulan oktober belum bisa menyelesaikan pembayaran jadi dikenakan denda.</p> <p>Jika wajib pajak belum membayar akan diberikan surat tagihan 3 kali jika tidak mau membayar akan dipasang stiker dengan aturan khusus.</p>
7.	Bagaimana upaya untuk merealisasikan target penerimaan PBB di BPPKAD Kabupaten Magelang?	<p>-Membuat tim penagihan piutang</p> <p>-Pemutakhiran data, jika wajib pajaknya jelas penagihannya enak tapi jika belum wajib pajak cenderung beralasan karena bukan atas namanya.</p>
8.	Apa upaya BPPKAD untuk mengurangi masalah tunggakan PBB?	Pemutakhiran data, kemudian mendorong setiap tim agar bisa mengoptimalkan penerimaan PBB, sosialisasi kepada wajib pajak, lebih transparan karena setiap yang belum disetorkan akan terlihat, melakukan pengawasan atau penertiban petugas pajak
9.	Sejauh ini apakah terdapat wajib pajak yang sulit diatasi dalam hal tunggakan pajak?	Ada beberapa ini berkaitan dengan perusahaan besar, mereka sempet kolab, asetnya besar, bangunan besar, tanahnya luas tetapi tidak digunakan jadi mereka tidak punya cash flow untuk melakukan pembayaran jadi dari pihak pemungut

		pajak melakukan penagihan berkali-kali. Akhirnya mereka bayar tetapi mundur trus tetapi mereka mau beresiko membayar denda
10.	Apakah terdapat obyek pajak yang masih belum ditetapkan?	Masih ada, pemutahiran atas mutasi, pemutahiran SPPT baru, atau pemutahiran atas penghapusan SPPT yang tidak ada subyek atas obyeknya, misalnya terdapat tanah 800 m kemarin dipecah kemudian menjadi 600 m yang 200 m hilang tanah itu kan menyusut kadang digunakan untuk vasum dan sebagainya. Oleh karena itu harus membuat SPPT baru
11.	Apakah alasan dilakukan penghapusan obyek pajak	Terjadinya bencana, tidak ditemukan subyek dan obyek pajak, belum dihapus induk sehingga menyebabkan SPPT double

C. Narasumber 3

Nama : Doso Sartono, S. Sos.

Jabatan : Kepala Subbidang P3SP

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa saja faktor penyebab tunggakan PBB di BPPKAD	<p>Banyak terutama pada saat masa pandemi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ekonomi wajib pajak yang banyak berkurang 2. Tidak sama luasan SPPT dan luasan dilapangan sehingga masyarakat keberatan dengan masalah tersebut 3. Wajib pajak tidak ditemukan, jadi punya objek pajak seperti perumahan atau kapling, mereka beli tetapi belum mutasikan SPPTnya sehingga masih menggunakan SPPT lama. Padahal orang yang membelinya itu keluar wilayah. Misalnya objek pajak A dibeli oleh B tetapi SPPTnya diberikan ke A. Oleh karena itu A tidak mau membayar 4. SPPT tidak sampai ke wajib pajak 5. Pihak pemungut yang kurang giat dalam pemungutan. Pihak BPPKAD karena sitemnya tidak langsung memungut jadi membuat tim, kadang terdapat petugas yang mepet jatuh tempo baru dibayarkan <p>Target tahun beberapa tahun sudah tercapai namun potensi setiap tahunnya itu terjadi tunggakan</p>

2.	Upaya yang dilakukan BPPKAD untuk mengatasi tunggakan PBB?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menelusuri wajib pajak yang membeli alamatnya dimana, kalau bisa memberikan nomor teleponnya , kalau sudah ditemukan wajib pajak tersebut untuk segera dimutasikan 2. Mengadakan tim penyelesaian PBB. Berkerjasama dengan Kadus, membuat surat untuk wajib pajak ke Desa. Sehingga kita dapat bertemu dengan wajib pajaknya jadi bisa mengetahui penyebab wajib pajak tidak membayar jika terjadi kesalahan mengenai SPPT bisa dengan memutakhirkan atau memutasikan data. Jika sudah sama SPPT dengan luasan lapangan diharapkan wajib pajak mau membayar perpajakannya 3. Selain terdapat tim penyelesaian PBB mulai tahun 2019 terdapat tim penyelesaian piutang pajak daerah. Diharapkan dengan pembentukan tim tersebut dapat mengoptimalkan tunggakan PBB 4. Memberikan intesifikasi 5. Jika terdapat wajib pajak yang bandel, pihak BPPKAD sudah mengajukan SK penghapusan denda, karena setelah jatuh tempo wajib pajak merasa keberatan dengan pembayaran dan menambah piutang dengan tidak dikenai denda maka wajib pajak hanya membayarkan pokoknya saja. 6. Penertiban petugas pajak dalam hal memungut, penyetoran ataupun pembukuan
3.	Kendala yang dihadapi oleh pihak BPPKAD dalam mengatasi tunggakan PBB?	Tidak ditemukan wajib pajak, sehingga kami merasa kesulitan untuk menemui wajib pajaknya. Oleh karena itu, kami berupaya berkoordinasi dengan penjual untuk menghubungi pembelinya. Karena sudah ketemu insyaallah akan dihubungi dan dimintai pertanggung jawaban perpajakannya
4.	Bagaimana respon wajib pajak saat dilakukan penagihan?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Banyak alasan misalnya keadaan perekonomian saat pandemi untuk kebutuhan saja sudah susah ditambah pembayaran pajak, wajib pajak tidak langsung bayar karena Kadus kurang responsif. 2. Data yang belum dimutasikan karena nama SPPT misalnya masih nama orang tua menjadikan wajib pajak enggan membayar.

		<p>Tetapi tidak mau memutasikan pajak. Padahal pihak BPPKAD bersedia untuk memutasikan data dan prosesnya tidak berbayar.</p> <p>3. Wajib pajak cenderung beralasan ingin menang sendiri.</p>
5.	Apakah terdapat sanksi untuk wajib pajak yang menunggak?	<p>Sanksi berupa administrasi sebesar 2 % setelah jatuh tempo untuk wajib pajak, mungkin dari Desa kalau belum melunasi pajaknya saat meminta izin ditanyakan pajaknya atau ditunda perizinannya. Kalo dari kami untuk sanksi belum seketat KPP karena keterbatasan alatnya</p>
6.	Bagaimana upaya untuk merealisasikan penerimaan PBB di BPPKAD Kabupaten Magelang?	<p>Intensifikasi, mengumpulkan wajib pajak yang menunggak, mengoptimalkan pemungut sesering mungkin untuk pihak Kecamatan maupun Kelurahan/Desa karena kadang wajib pajak sudah membayar tetapi pihak kadus tidak menyetorkan ke Bank Jateng</p>
7.	Apakah upaya BPPKAD dalam mengurangi masalah tunggakan PBB ?	<p>Intensifikasi, menyadarkan wajib pajak maupun pemungut sehingga pajak yang dibayarkan tidak berhenti dengan aturan 1x24jam sudah disetorkan ke Bank</p>



Lampiran 3 Bukti Submit Jurnal



BILANCIA

Jurnal Ilmiah Akuntansi

Letter of Acceptance

No. 185/JUR/IBTPI/V/2022

Kepada Yth.,
Bapak / Ibu Penulis
di Tempat.

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini, *Editor in Chief* Bilancia : Jurnal Ilmiah Akuntansi, menerangkan bahwa artikel yang ditulis oleh:

Nama : **Choirunisa Romadhoni, Nibras Anny Khabibah, dan Nuwun Priyono**

Dengan Judul : **PENYELESAIAN MASALAH TUNGGAKAN PAJAK UNTUK OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI BPPKAD KABUPATEN MAGELANG**

Sudah dinyatakan diterima oleh Tim Reviewer dan akan diproses selanjutnya untuk diterbitkan dalam **Bilancia : Jurnal Ilmiah Akuntansi** Volume 6 Nomor 3 edisi September 2022.

Pekanbaru, 20 Mei 2022
Hormat kami,




Prof. Dr. Amries Rusli Tanjung, S.E., M.M., Ak.
Editor in Chief
Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi

Institut Bisnis dan Teknologi Pelita Indonesia
Jl. Jend. Ahmad Yani No. 78-88
Pekanbaru, Riau, Indonesia, 28127
Telp. (0761) 24418 (Hunting) Fax. (0761) 35508



LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LPPM)
INSTITUT BISNIS DAN TEKNOLOGI PELITA INDONESIA

Lampiran 4 Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI**
UNIVERSITAS TIDAR
FAKULTAS EKONOMI
JURUSAN AKUNTANSI
 Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116
 Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438
 Laman: www.untidar.ac.id Surel : ekonomi@untidar.ac.id

Nomor : T/212/UN57.F1.1/KM.07/202 23 Mei 2022
 Hal : Permohonan data dan Izin Penelitian

Yth. Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD)
 di Jalan Soekarno No.59 Kota Mungkid
 Kabupaten Magelang


Dengan hormat,

Dalam rangka menyelesaikan studi pada Program Studi S1 Ekonomi Pembangunan
 Fakultas Ekonomi Universitas Tidar, setiap mahasiswa diwajibkan memenuhi salah satu
 persyaratan akademik diantaranya pembuatan Skripsi/Tugas Akhir.

Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon Bapak/Ibu memberikan izin kepada
 mahasiswa kami dibawah ini, untuk melakukan penelitian/survei di BPPKAD Kabupaten
 Magelang dan memperoleh data atau keterangan yang diperlukan dalam penyusunan
 skripsinya. Adapun mahasiswa tersebut atas nama :

Nama : Choirunisa Romadhoni
 NIM : 1910102049
 Prodi/Jurusan : D-III Akuntansi
 Semester : VI (enam)
 No.HP : 085875380469
 Judul Skripsi : Upaya Penyelesaian Masalah Tunggakan Pajak Dalam Rangka Optimalisasi
 Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di BPPKAD Kabupaten Magelang
 Waktu Penelitian : 23 Mei 2022
 Tempat Penelitian : BPPKAD Kabupaten Magelang
 Data yang dibutuhkan : Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2017-2021

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan
 terima kasih.



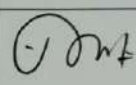
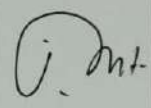
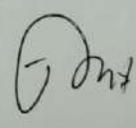
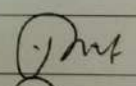
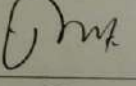
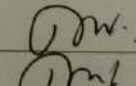
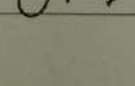
Ketua Jurusan Akuntansi,
 Dr. Utapa Rani, S.E., M.Si.,
 NIP. 198004092015042001

Tembusan :
 - Kepala Sub Bidang P4 BPPKAD Kabupaten Magelang

Lampiran 5 Kartu Pembimbingan Pembimbing I dan II




KARTU PEMBIMBINGAN TUGAS AKHIR

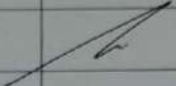


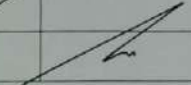
Nama : Choirunisa Romadhoni
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1910102049
 Jurusan/Prodi : DIII Akuntansi
 Judul Tugas Akhir : Upaya Penyelesaian Masalah Tunggakan Pajak dalam Rangka Optimalisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di BPPKAD Kabupaten Magelang
 Konsentrasi : Akuntansi Keuangan Daerah
 SKS ditempuh : 106 SKS
 Pembimbing I : Nuwun Priyono, S.E., M.Ak., Akt., CA
 Pembimbing II : Nibras Anny K., S.E, M.Sc., Ak
 Nomor dan tanggal SK :
 Pembimbing I

No	Tanggal	Saran Perbaikan	Tanda Tangan Pembimbing
1.	07 Juni 2022	a. Pengajuan BAB I b. Perbaikan: memperbaiki tata cara penulisan	
2.	10 Juni 2022	a. Revisi BAB I b. Pengajuan BAB II c. Perbaikan: memperbaiki kerangka berpikir d. ACC BAB I	
3.	15 Juni 2022	a. Revisi BAB II b. Pengajuan BAB III c. Perbaikan: 1. Memperbaiki data primer dan sekunder 2. Memperbaiki keabsahan data 3. Perbaikan: menambah sumber referensi rumus perhitungan d. ACC BAB II	
4.	17 Juni 2022	a. Revisi BAB III b. ACC BAB III	
5.	21 Juni 2022	a. Pengajuan BAB IV dan BAB V b. Perbaikan: penambahan sumber referensi setiap pembahasan	
6.	24 Juni 2022	a. Revisi BAB IV dan BAB V b. ACC BAB IV dan BAB V	
7.	28 Konsep Bersih	Konsep Bersih	

KARTU PEMBIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama : Choirunisa Romadhoni
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1910102049
 Jurusan/Prodi : DIII Akuntansi
 Judul Tugas Akhir : Upaya Penyelesaian Masalah Tunggakan Pajak dalam Rangka Optimalisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di BPPKAD Kabupaten Magelang
 Konsentrasi : Akuntansi Keuangan Daerah
 SKS ditempuh : 106 SKS
 Pembimbing I : Nuwun Priyono, S.E., M.Ak., Akt., CA.
 Pembimbing II : Nibras Anny K., S.E, M.Sc., Ak
 Nomor dan tanggal SK :
 Pembimbing II

No	Tanggal	Saran Perbaikan	Tanda Tangan Pembimbing
1.	31 Mei 2022	a. Pengajuan BAB I b. Perbaikan: 1. Memperbaiki tata cara penulisan 2. Menambah rumusan masalah	
2.	06 Juni 2022	a. Revisi BAB I b. Pengajuan BAB II c. Perbaikan : 1. Memperbaiki tata cara penulisan 2. Pengurangan Bab II fokus pada penjelasan PBB saja, mengenai pajak secara umum tidak perlu dicantumkan. 3. Menghilangkan penomoran untuk kajian pustaka 4. Judul pada kerangka teoritis tidak perlu dicantumkan 5. Perbaikan kerangka berpikir belum mencerminkan alur berpikir yang mengarah pada pertanyaan penelitian d. ACC BAB I	
3.	09 Juni 2022	a. Revisi BAB II b. Perbaikan : 1. Penambahan penomoran 2. Kerangka teoritis dibuat tabel	

		3. Memperbaiki tabel kerangka teoritis diurutkan berdasarkan tahun terbaru	
		c. ACC BAB II	
4.	14 Juni 2022	a. Pengajuan BAB III b. ACC BAB III	
5.	16 Juni 2022	a. Pengajuan BAB IV 1. Memperbaiki tata cara penulisan 2. Memperbaiki tabel keabsahan 3. Penambahan grafik 4. Penambahan sumber informasi dalam pembahasan 5. Memperbaiki penulisan singkatan	
6.	20 Juni 2022	a. Revisi BAB IV b. Pengajuan BAB V c. Perbaikan: pada BAB IV model diagram diganti d. ACC BAB IV-BAB V	
7.	29 Juni 2022	Konsep bersih	

Lampiran 6 Foto wawancara dengan Narasumber

Lampiran 6. 1 Dokumentasi Wawancara Narasumber 1



Lampiran 6. 2 Dokumentasi Wawancara Narasumber 2



Lampiran 6. 3 Dokumentasi Wawancara Narasumber 3

